ANALISIS PENYELESAIAN MEDIASI PERUNDUNGAN MURID KEPADA GURU DI SEKOLAH PELANGGARAN SILA KELIMA PANCASILA

Jeane Neltje Saly¹, Aiska Rahima Az-Zahra², Cesilia Aprianes³, Ellina Dewi⁴,
Febriany⁵, Patricia Debby Julydya⁶ & Theodora Suhartanto⁷

¹Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: jeanes@fh.untar.ac.id

²Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: aiska.205230255@stu.untar.ac.id

³Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: cesilia.205230118@stu.untar.ac.id

⁴Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: ellina.205230124@stu.untar.ac.id

⁵Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: febriany.20523011@stu.untar.ac.id

⁶Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: patricia.205230112@stu.untar.ac.id

⁷Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: theodora.205230119@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

Bullying of teachers is a violation of Law no. 1 of 2023. The purpose of this article is to determine the implementation of Pancasila, including the level of legal awareness and dynamics developing in society regarding the importance of the role of law in protecting individuals, including teachers, from acts of bullying, as well as discussing ethical aspects in the context of education and efforts to involving all parties in creating a safe and peaceful school environment. Apart from that, this article also aims to identify problems in cases of teacher bullying. This research uses normative legal research methods with a literature review approach. This research is descriptive and explanatory, focusing on a limited number of cases to understand the context more specifically. Data were analyzed qualitatively using a deductive logic approach. The school's response to the bullying included asking the parents of the students involved to find a solution, but no legal action was taken against the perpetrator. Even though there is a law that regulates criminal sanctions for perpetrators of bullying over the age of 12, this incident finally ended with an apology from the student. The Deputy Principal, as the victim, chose to forgive his student and recorded a peace agreement without taking legal action. The main cause of teacher bullying is dissatisfaction with the Deputy Principal's decision, which creates tension, so it is necessary to foster respect for teachers who have an important role in our education, as well as the importance of mutual respect and appreciation to overcome this problem.

Keywords: *Bullying, Violation of Pancasila.*

ABSTRAK

Perundungan terhadap guru merupakan pelanggaran terhadap UU No. 1 Tahun 2023. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Pancasila antara lain tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam Masyarakat mengenai pentingnya peran undang-undang dalam melindungi individu, termasuk guru, dari tindakan perundungan, sekaligus membahas aspek etika dalam konteks pendidikan dan upaya untuk melibatkan semua pihak dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan tentram. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam kasus perundungan guru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kajian pustaka. Penelitian ini bersifat deskriptif dan eksplanatori, dengan fokus pada sejumlah kasus terbatas untuk memahami konteks secara lebih spesifik. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan logika deduktif. Tanggapan sekolah terhadap perundungan tersebut antara lain meminta orang tua siswa yang terlibat untuk mencari solusi, namun tidak ada tindakan hukum yang diambil terhadap pelaku. Meski sudah ada undang-undang yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku perundungan yang berusia di atas 12 tahun, namun kejadian ini akhirnya diakhiri dengan permintaan maaf dari pihak pelajar. Wakil Kepala Sekolah selaku korban, memilih memaafkan muridnya dan mencatat kesepakatan damai tanpa menempuh jalur hukum. Penyebab utama perundungan guru adalah ketidakpuasan terhadap keputusan Wakil Kepala Sekolah sehingga

menimbulkan ketegangan sehingga perlu ditumbuhkan rasa hormat terhadap guru yang mempunyai peranan penting dalam pendidikan kita, begitu pula pentingnya sikap saling menghormati dan menghargai untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Kata kunci: Perundungan, Pelanggaran Pancasila

1. PENDAHULUAN

Perundungan murid kepada guru di SMAN Maluku Tengah Provinsi Maluku bertentangan dengan hukum. Dasar yuridis/hukum dalam memperoleh perlindungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 2023).

Pertimbangan dibuatnya UU No. 1 Tahun 2023 tersebut dituangkan ke dalam tiga poin, dimana dijelaskan dalam poin (a) mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana masyarakat bangsa-bangsa perlu mengakui asas hukum umum serta untuk mengganti kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan warisan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda sehingga perlu disusun hukum pidana nasional (JDIH BPK RI, 2023).

Poin (b) dalam UU No. 1 Tahun 2023 ditentukan bahwa harus ada penyesuaian antara hukum pidana nasional dengan politik hukum, keadaan, serta perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bertujuan untuk menghormati serta menjunjung tinggi hak asasi manusia berdasarkan Keseluruhan isi dalam Pancasila (JDIH BPK RI, 2023).

Hal ini berkaitan erat dengan sila kelima Pancasila yang telah dijelaskan bahwa keadilan wajib dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang suku bangsa, agama atau ras. Sehingga kosiderasi poin (b) memiliki satu tujuan dan fungsi, yang dapat dilaksanakan secara Bersama dalam mewujudkan keadilan. Poin (c) dalam UU No. 1 Tahun 2023 menyatakan isi dari hukum pidana nasional yang mengandung keseimbangan peraturan antara kepentingan umum dan individu, perlindungan tindak pidana terhadap pelaku dan korban, unsur yang mempengaruhi perbuatan batin dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum, antara hukum tulis dan hukum dalam masyarakat, nilai menyeluruh, nilai nasional, serta hak asasi manusia dan kewajibannya (JDIH BPK RI, 2023).

Maksud dari pembuatan UU No. 1 Tahun 2023 adalah untuk memastikan bahwa pengembangan sistem hukum nasional dapat berlangsung dengan cara yang terstruktur, terkoordinasi, dan terencana. Oleh karena itu, berbagai sektor dapat berkontribusi secara efektif terhadap pembangunan nasional sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan sejalan dengan tingkat pemahaman hukum serta perkembangan dinamika yang ada dalam Masyarakat.

Pada kenyataannya UU No. 1 Tahun 2023 masih belum terwujud secara penuh dapat dilihat pada kasus perundungan murid kepada guru di SMAN Maluku Tengah Provinsi Maluku. Kasus ini menjadi sorotan karena murid-murid di SMAN Maluku Tengah terbukti telah merundung guru mereka karena tumbuhnya rasa tidak puas terhadap kebijakan dan juga kinerja guru mereka. Perundungan yang dilakukan secara beramai-ramai oleh para murid dengan menyembunyikan kunci motor Wakil Kepala Sekolah dan juga mengejek beliau dihadapan umum serta tindakan perundungan yang direkam dan kemudian diunggah ke media sosial, jelas telah menjatuhkan martabat Wakil Kepala Sekolah. Kejadian tersebut bertentangan dengan sila kelima Pancasila "Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" dalam Undang-Undang UU No. 1 Tahun 2023 terkait dengan tanggapan sekolah terhadap perundungan tersebut antara lain meminta orang tua siswa yang terlibat untuk mencari solusi, namun tidak ada tindakan hukum yang diambil

terhadap pelaku. Meski sudah ada undang-undang yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku perundungan yang berusia di atas 12 tahun, namun kejadian ini akhirnya diakhiri dengan permintaan maaf dari pihak pelajar. Wakil Kepala Sekolah sebagai guru korban, memaafkan muridnya dan mencatat kesepakatan damai tanpa menempuh jalur hukum. Penyebab utama perundungan guru adalah ketidakpuasan terhadap keputusan wakil kepala sekolah sehingga menimbulkan ketegangan sehingga perlu ditumbuhkan rasa hormat terhadap guru yang memunyai peranan penting dalam Pendidikan, pentingnya sikap saling menghormati dan menghargai untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan dari kedua belah pihak sehingga kasus ini tidak dilanjutkan ke ranah hukum pidana. Perlakuan ini melanggar poin (c) dalam UU No. 1 Tahun 2023 dimana diharapkan terdapat perlindungan terhadap korban dalam suatu tindak pidana.

Adapun rumusan masalah adalah bagaimana perundungan murid kepada guru di SMAN Maluku Tengah Provinsi Maluku melanggar sila kelima Pancasila dan apa saja hambatan dalam penegakan terhadap kasus perundungan murid kepada guru di SMAN Maluku Tengah Provinsi Maluku Pelanggaran Sila Kelima Pancasila?

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normative guna memperoleh bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, dan tulisan berkaitan berkaitan dengan pelanggaran sila kelima pancasila. Sifat penelitian deskriptif (menggambarkan) gejala-gejala berhubungan dengan pelanggaran sila kelima pancasila khususnya tentang pelanggaran dan penyelesaian secara mediasi. Penelitian juga dilakukan terhadap beberapa kasus dengan topik yang sama untuk memahami konteks secara spesifik. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif serta menggunakan logika deduktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lingkungan dunia Pendidikan terkadang sangat dekat dengan peristiwa-peristiwa perundungan atau yang sering dikenal sebagai "*bullying*" yang dapat didefinisikan sebagai perilaku negatif dimana terdapat aksi yang menyakiti secara verbal (ujaran kebencian) maupun non-verbal (kekerasan fisik) yang dengan berulang kali dilakukan dan berujung melibatkan beberapa individu yang menyebabkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan (Haekal, 2021). Penyebab terjadinya perundungan ini disebabkan oleh banyak hal yang berhubungan dengan pelaku dan juga korban perundungan, dimana murid yang memiliki karakter negatif menyebarkan hal negatif itu kepada murid lain (Mayasari, 2019).

Olweus memberikan pengertian bahwa "*It's not bullying when two student of about the same strange or power argue or fight.*" Dengan demikian, dalam pengertian perundungan lebih menekankan pada konteks ketidakseimbangan kekuatan, yang nyata terlihat saat beberapa bentuk perundungan terjadi, seperti pengucilan, penyebaran rumor, dan sarkasme yang menyakitkan dari sekelompok orang terhadap satu orang. Artinya, dalam perundungan, ada ketidakseimbangan kekuatan yang berlangsung secara berkelanjutan selama periode waktu yang lama (Marasaoly, 2022).

Saat ini, *bullying* sudah semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia, sehingga pelaku perundungan saat ini dapat mudah diketahui tindakannya. Pada umumnya pelaku perundungan berupa sekelompok orang dengan tujuan mencelakakan korban. Hal ini tidak jarang terjadi di

lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Pada umumnya pelaku akan mencari target korban yang menurut mereka lemah, tidak berdaya dan merasa terancam (Zakiyah, 2017). Akibatnya, muncul perasaan tidak aman serta rasa cemas oleh para korban perundungan yang lebih parah jika dibandingkan dengan orang yang tidak dirundung (Chiani, 2022).

Peristiwa perundungan yang terjadi di SMAN 15 Maluku Tengah Provinsi Maluku, memperlihatkan kepada kita bukti nyata tindakan perundungan yang dilakukan oleh sekumpulan murid kepada Wakil Kepala Sekolah berinsial ML. Peristiwa ini terjadi pada hari Senin, 14 Agustus 2023. Pada saat itu, para murid mengambil kunci motor milik ML. Tidak hanya itu, para murid juga menyembunyikan kunci motor tersebut dan mencegat motor ML (Fauziah, 2023).

Perilaku perundungan ini jelas bertentangan dengan isi dari UU No. 1 Tahun 2023 Pasal 34 yang menyatakan bahwa seseorang dengan terpaksa melakukan suatu perbuatan yang dilarang akan dipidana apabila perbuatan itu dilakukan dengan tujuan untuk membela diri terhadap tindakan atau ancaman penyerangan, yang merugikan dan melawan hukum terhadap dirinya sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.

Kasus perundungan ini terkait dengan sila kelima Pancasila yaitu nilai keadilan yang mengajarkan cara berperilaku adil terhadap sesama tanpa membeda-bedakan, sehingga nilai keadilan ini dapat membangun karakter baik pada diri siswa dengan sendirinya serta meminimalisir terjadinya perundungan di lingkungan Pendidikan. Nilai-nilai Pancasila yang telah dituliskan diatas memperlihatkan secara jelas, jika Pancasila mempunyai banyak sekali nilai kemanusiaan yang dapat membangun karakter menjadi lebih baik (Pratiwi, 2021).

Nilai-nilai Pancasila memiliki kedudukan penting sehingga berpengaruh besar dalam membentuk karakter positif terhadap generasi muda. Pancasila sangat penting untuk hadir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dapat dijadikan sebagai pelindung dalam pembaharuan karakter bangsa yang semakin memudar. Seperti pada kasus perundungan murid terhadap Guru di SMAN Maluku Tengah Provinsi Maluku ini terlihat jelas adanya karakter murid-muridnya yang pudar (Pratiwi, 2021). Sangat jelas terlihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh para pelajar terhadap Wakil Kepala Sekolah ini melanggar Pasal 36 UU No. 1 Tahun 2023 ayat 1 dan 2 dimana, perbuatan yang dilakukan oleh para pelajar jelas dilakukan dengan sengaja ataupun kealpaan. Atas tindakan yang dilakukan tersebut maka, para pelajar seharusnya dapat ditindak pidanakan.

Upaya penyelesaian dalam kasus perundungan ini, mengalami hambatan akibat perbuatan perundungan itu dipacu oleh pihak lain sebagai akibat ketidakpuasan beberapa oknum di balik layar terhadap kebijakan pengelolaan, dan manajemen Wakil Kepala Sekolah, seperti pemilihan OSIS tanpa melibatkan Majelis Perwakilan Kelas, tidak diizinkan untuk menyampaikan pendapat, hingga menetapkan Ketua Gugus Depan Pramuka. (Fauziah, 2023).

Namun demikian kasus perundungan ini berakhir secara damai. Wakil Kepala Sekolah menerima permintaan maaf dari para murid yang melakukan aksi perundungan. Padahal Pasal 40 UU No. 1 Tahun 2023 menentukan bahwa, seseorang di atas 12 tahun telah dapat dipidanakan. Hal ini berguna untuk memberikan efek jera. Wakil Kepala Sekolah selaku pendidik dari para murid memberikan contoh bagaimana sikap musyawarah mufakat pelaksanaan sila ke empat Pancasila dengan menyelesaikan permasalahan ini melalui saling memaafkan dan berdamai tanpa melibatkan proses hukum.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Perundungan merupakan perilaku kekerasan dan ancaman untuk mengintimidasi yang dilakukan murid kepada guru di SMAN Maluku Tengah Provinsi Maluku melanggar sila kelima Pancasila yang merupakan roh dari Pasal 40 UU No. 1 Tahun 2023. Namun penyelesaiannya dapat dilakukan secara musyawarah mufakat.

Hambatan penyelesaian berupa perundungan didorong oleh unsur ekstern berupa rasa ketidakpuasan terhadap keputusan-keputusan pihak wakil kepala sekolah sehingga menimbulkan kegaduhan, dan bukan berasal dari dalam diri pihak murid.

Menurut penulis, sebaiknya sebagai bangsa Indonesia baik di sekolah maupun di Masyarakat diajarkan tentang pentingnya tataran karakter yang santun sesuai dengan sila-sila Pancasila gambaran kearifan local bangsa Indonesia.. Pendidikan karakter yang baik akan berdampak terhadap kelangsungan hidup bangsa, yang kedepannya akan menjadi pijakan anak Indonesia untuk terus berkembang menjadi karakter yang berkualitas dan memiliki akhlak yang baik.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan anugerah-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada masing-masing pihak yang terlibat dalam penelitian ini, serta pihak-pihak lainnya yang mendukung proses pelaksanaan penelitian ini.

REFERENSI

- Zulkodri, M. (2023, Agustus 20). *Nasib maryam guru yang dibully puluhan siswa di sman 15 maluku tengah, ini kata kepala sekolah*. Bangkapos.com. <https://bangka.tribunnews.com/2023/08/20/nasib-maryam-guru-yang-dibully-puluhan-siswa-di-sman-15-maluku-tengah-ini-kata-kepala-sekolah>.
- Chiani, S. H., Sulami, N., Windari, A. P., Irawan, B., & Indrayani, N. (2022). Studi tentang perilaku perundungan siswa sekolah menengah kejuruan (smk) di kabupaten bima. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(2), 415-418. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i2.444>
- Fauziah, P. (2023, Agustus 18). *Kronologi guru di-bully puluhan siswa di maluku tengah*. *journal soreang*. [journal soreang.com https://journalsoreang.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1017011117/kronologi-guru-di-bully-puluhan-siswa-di-maluku-tengah-ternyata-ini-alasannya](https://journalsoreang.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1017011117/kronologi-guru-di-bully-puluhan-siswa-di-maluku-tengah-ternyata-ini-alasannya).
- Haekal, M. (2021). Perundungan dalam perspektif bourdieu: studi tentang pengalaman mahasiswa indonesia menghadapi perundungan di masa kecil. *JAS-PT (Jurnal Analisis Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia)*, 5(2), 155-166.
- Marasaoly, S. (2022). Pencegahan Perundungan (Bullying) Terhadap Siswa SD Dan SMP Dalam Implementasi Kota Peduli Ham Di Kota Ternate. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 9(2), 94-112. <https://doi.org/10.32505/politica.v9i2.4873>
- Mayasari, A., Hadi, S., & Kuswandi, D. (2019). Tindak perundungan di sekolah dasar dan upaya mengatasinya. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 4(3), 399-406. <http://dx.doi.org/10.17977/jptpp.v4i3.12206>
- Pratiwi, E. F., Saâ, S. S., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Implementasi pendidikan kewarganegaraan melalui nilai pancasila dalam menangani kasus bullying. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 5472-5480. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i6.1648>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2023. Jakarta: JDIH BPK RI*

Zakiah, E. Z., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Faktor yang mempengaruhi remaja dalam melakukan bullying. *Prosiding penelitian dan pengabdian kepada masyarakat*, 4(2). <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14352>